

Terorisme: Gejala Kriminal Media Mutakhir

Oleh: Atom Ginting Munthe
Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRAK

Aksi terror terjadi karena pelakunya merasa tidak berdaya menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang lazim dan terlegitimasi secara formal. Terorisme diasumsikan berkaitan dengan faktor-faktor kemiskinan, ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik serta jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda. Media massa berperan mensosialisasikan aksi-aksi teroris melalui pemberitaan yang berdampak pada munculnya ketakutan publik yang kuat. Manajemen publik yang tidak efektif dalam mengantisipasi aspirasi dan kebutuhan publik melahirkan kelompok yang merasa terpinggirkan yang kemudian dimanfaatkan oleh kaum teroris untuk mengembangkan organisasinya.

Kata Kunci: Public management, Terrorism, Mass media, Poverty, Social Injustice and Mass fearness

Pendahuluan

Pemikiran konvensional dunia Barat mengenai keamanan di bawah pimpinan Amerika Serikat telah berubah sejak terjadinya serangan terhadap gedung kembar *World Trade Center* bulan September 2001. Peristiwa itu serta merta menggeser isu terorisme dari sekedar isu "transnasional pinggiran" menjadi "pusat hirauan" keamanan warga negara dan negara khususnya negara maju teristimewa Amerika Serikat. Isu ini digolongkan sebagai sesuatu yang rumit, saling berkaitan, multidimensional bukan hanya melulu masalah militer. Pendek kata, bukan suatu hal biasa, tetapi asing dan luar biasa juga menakutkan karena dan mengagetkan, datangnya pun tidak sarat dengan gejala yang belum dikenal dan mengagetkan, datangnya pun tidak terduga. Teroris selalu mengubah sasarannya secara drastis begitu pula dengan tempat, waktu, dan cara-cara yang ditempuhnya. Itulah sebabnya orang selalu terkecoh karena tidak bisa meramalkan dan mengantisipasi gerakan teroris. Namun masih terdapat pola khas dari lokasi yang sering dijadikan sasaran gerakan teroris, yaitu tempat-

tempat yang ramai didatangi publik dan menyandang simbol-simbol tertentu khususnya yang mempunyai dampak luas. Ketakutan yang ditimbulkan oleh gerakan teroris semakin mencekam karena tempat-tempat yang menyimpan simbol seperti itu jumlahnya banyak, tersebar di mana saja. Dari ciri-ciri lokasi sasaran teroris tadi maka hampir pasti teroris tidak akan pernah melakukan aksinya di tempat-tempat terpencil yang jauh dari keramaian, seperti di hutan liar atau di gunung-gunung. Sementara teroris membutuhkan jatuhnya dan penyebaran informasi luas tentang aksinya. Suatu tujuan yang membutuhkan bantuan media massa yang biasanya memantau peristiwa-peristiwa di tempat-tempat publik terbuka dan ramai dikunjungi orang. Tempat-tempat terpencil di hutan belantara atau di gunung paling pas dijadikan tempat persembunyian atau basis gerakan teroris agar kegiatan mereka terlindung dari pengamatan publik yang bisa menggagalkan rencananya. Agar aksinya tidak mudah dikenali teroris menjalankan aksinya dengan modus yang beragam mulai dari

surat beracun sampai peledakan bom. Menurut penilaian beberapa pemerhati wilayah Asia dan Pasifik merupakan daerah yang rawan terhadap sasaran teroris mengingat besarnya jumlah penduduk, keragaman etnik atau suku bangsa, agama, latar belakang sejarah pertikaian sektarian, ketidakadilan, dan penindasan serta kemiskinan yang merata.

Keterlibatan aktor-aktor trans-nasional turut berperan dalam memicu laju tercetusnya perselisihan dan ketidakamanan di Asia dan Pasifik. Sementara di dalam negeri masing-masing negara mendapat tekanan yang berasal dari adanya kesulitan memperoleh pendapatan karena ulah sementara pihak yang mengurus sumber-sumber daya alam secara berlebihan hanya demi keuntungan baginya, tingginya mobilisasi penduduk dan keterlibatan aktor-aktor non negara yang bersaing dengan negara untuk mendapatkan uang, pengaruh, bahkan kekuasaan. Penurunan mutu lingkungan menjadikan masalah pemerintahan dan pembangunan di negara miskin semakin parah. Hal itu kemudian mendorong terjadinya migrasi internal (urbanisasi) maupun lintas batas negara dengan alasan mencari kehidupan yang lebih baik. Di negara miskin Asia masyarakat menggantungkan harapan pada 'kemurahan hati alam' bagi pengadaan pangan, energi dan air bersih karena pelayanan pemerintah tidak memadai. Daftar kesulitan sebagai akibat kemiskinan masih diperpanjang lagi oleh masalah-masalah sosial seperti korupsi, pelacuran, narkoba dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kelemahan pemerintah dalam mengatasi semua masalah tadi melahirkan tindakan perlawanan dari rakyat dalam bentuk

gerakan separatis, perlawanan bersenjata, konflik antar suku, kriminalitas, dan terorisme. Lambat laun tindakan perlawanan ini meluas melintasi batas negara. Begitulah akhirnya apa yang biasanya dilakukan oleh aktor negara, seperti serbuan Amerika Serikat ke Irak tanpa alasan yang jelas, kemudian dipraktekkan oleh aktor non negara di negara lain dalam bentuk gerakan terorisme.

Kita menyaksikan bagaimana aksi-aksi teror menimbulkan kepanikan luar biasa pada masyarakat. Teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, menurunkan wibawa pemerintah. Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar terutama dengan terjadinya aksi teror peledakan bom di sejumlah tempat seperti di Bali sampai dua kali dan menempati kolom paling atas ditinjau dari jumlah korban dan pemberitaan yang menembus lingkup internasional. Menyusul kemudian di hotel JW Marriot Jakarta dan di depan Kedutaan Australia, Kedutaan Filipina dan belakangan di pasar Tentena Poso. Adalah kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang paling sering dianggap bertanggung jawab terhadap aksi-aksi teror di Indonesia. Ada dugaan yang kuat bahwa basis dari aksi-aksi teror di Asia Tenggara adalah di Indonesia dan organisasi yang dimaksudkan adalah JI.

Ketidakadilan ekonomi dan politik serta kemiskinan diasumsikan sebagai salah satu akar permasalahan yang memicu maraknya aksi-aksi teror di Indonesia. Ketidakadilan muncul dalam upaya "meminggirkan"¹ kelompok masyarakat tertentu dalam lingkup politik karena dinilai tidak sepaham atau sealian. Tindakan ini tampil dalam

¹. Kelompok yang terpinggirkan ini dikenal dengan istilah kelompok marjinal yang terjadi sebagai akibat sikap kelompok itu yang dinilai tidak menguntungkan pihak yang berkuasa sehingga mendapat semacam hukuman berupa tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan akan sarana pembangunan bagi pertumbuhan ekonomi kelompok tersebut. Akibatnya lambat laun pertumbuhan ekonomi akan jalan di tempat bahkan bisa mandek sama sekali.

wujud penundaan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mengakses jaringan yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat yang merasa terpinggirkan ini akan mengajukan tuntutan perbaikan yang jika tidak dipenuhi atau mendapat tanggapan yang bijak, lambat laun akan berubah menjadi gerakan radikal. Masyarakat semacam ini menjadi sasaran empuk bagi usaha para teroris untuk merekrut calon-calon teroris baru dengan iming-iming perbaikan mutu hidup. Ada banyak pemerhati menghubungkan perilaku mempengaruhi calon-calon teroris tadi dengan perilaku yang berdasar ketaatan menjalankan ibadah agama Islam.

Peristiwa bersejarah bagi iklim demokrasi di Indonesia diawali dengan 'lengser'-nya Persiden Soeharto pada bulan Mei 1998 dari puncak pemerintahan yang dipimpinnya selama hampir 32 tahun lamanya. Momen itu menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam memasuki periode transisi menjadi salah satu negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar. Kejadian ini sangat berarti bagi perkembangan demokrasi di dunia terutama bagi negara-negara yang selama ini gigih memperjuangkan perluasan demokrasi, misalnya Amerika Serikat. Fakta tersebut dipertegas lagi setelah terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum paling demokratis selama adanya pemilihan umum di Indonesia sejak 1955. Pasangan ini meneruskan era reformasi yang dirintis oleh pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya, yaitu Abdurrachman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Namun reformasi tidak

dapat menghentikan aksi-aksi kekerasan, demonstrasi dan peledakan bom di berbagai kota di Indonesia. Peledakan bom yang dinyatakan sebagai aksi yang menjadi tanggung jawab teroris masih merupakan suatu hal "baru" dalam politik Indonesia. Kejadian itu jarang terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Namun serangan bom kemudian meningkat sejak kejatuhan Soeharto di bulan Mei 1998, khususnya tahun 2001: dari Januari hingga Juli tercatat sebanyak 81 peristiwa, sementara di Jakarta terjadi 29 peristiwa, yang lainnya terjadi di berbagai kota, misalnya Depok, Bekasi, Yogyakarta, Banten dan Sulawesi Tenggara. Kejadian-kejadian di atas menjadi bukti dari dalil pengamat terorisme Alberto Abadie yang mengatakan bahwa negara dalam masa transisi dari totalitarisme menuju demokrasi dicirikan oleh maraknya aksi-aksi kekerasan termasuk terorisme.²

Para analis menilai intensitas aksi-aksi teroris berkaitan erat dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda dan menghubungkannya dengan tangkapnya Amrozy, Imam Samudra alias Abdul Aziz, dan Muklas alias Ali Gufon setelah ledakan bom di Bali tahun 2002. Bagaimanapun juga penangkapan atas beberapa orang dan upaya mengkaitkannya dengan jaringan terorisme internasional belum dapat menjawab sejumlah pertanyaan. Pengkaitan dengan jaringan internasional merupakan argumen yang dipercaya oleh masyarakat internasional. Pemerintah Amerika Serikat meyakini keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Menurut laporan intelijen Singapura dan Malaysia, Al-Qaeda hadir di kawasan Asia Tenggara lewat Jemaah Islamiyah (JI), karena pemimpin JI kebanyakan adalah orang

² Alberto Abadie, 2004, Poverty, Political Freedom and the Roots of Terrorism, NBER Working Paper No.1085, Oktober 2004, h.3.

Indonesia.³ Sejumlah pengamat di Indonesia percaya bahwa para terduduh adalah penjahat dalam negeri, karenanya sangat berhati-hati dalam menghubungkan tindakan teroris ini dengan terorisme global. Sejak tertangkapnya Amrozi, Imam Samudra, dan Muklas media massa berupaya mengkaitkan informasi berdasarkan laporan polisi. Disimpulkan bahwa jaringan individu dan sel yang kompleks telah terlibat dalam serangan bom Bali. Disinyalir paling sedikit ada sembilan kelompok yang disebut-sebut sebagai terlibat. Kelompok Serang (13 orang), kelompok Abdul Rauf (4 orang), kelompok Suko-harjo (2 orang). Tiga kelompok ini terlibat dalam persiapan, menyembunyikan pelaku, pendanaan dan survey. Kelompok Lamongan (11 orang), kelompok Bali (4 orang) merupakan kelompok yang terlibat langsung dalam peledakan. Sedangkan kelompok Solo (9 orang) menangani pasca ledakan dan mencari tempat persembunyian. Selanjutnya ada pula kelompok Riau dan Menado yang terlibat secara tidak langsung dalam persiapan.

Uraian di atas menegaskan adanya kebutuhan dari aksi teror akan dukungan suatu organisasi yang rapi dengan jumlah personil yang memadai dengan kapasitas kemampuan militer yang memadai pula. Oleh karena itu, muncul keyakinan bahwa demi mencapai target maka kelompok teroris senantiasa akan berusaha merekrut anggota baru. Aparat keamanan menilai ledakan bom setelah bom Bali II bulan Oktober 2005 dilakukan oleh generasi

baru.⁴ Pasca penangkapan para pelaku teror di Bali tahun 2002 muncul pelaku teror baru dengan menggunakan cara-cara operasional baru.⁵

Pengertian dan konsep-konsep dasar terorisme

Dalam mendefinisikan terorisme menurut sementara komentator terdapat masalah *value-neutrality*.⁶

Apa yang digambarkan sebagai terorisme oleh suatu kelompok bisa jadi akan berbeda dengan penggambaran oleh kelompok lain yang justru menyatakan hal tersebut sebagai kepahlawanan atau suatu tindakan normal laksana politik luar negeri.⁷

Pada dasarnya terorisme muncul dalam bentuk tindakan kekerasan yang menimbulkan 'ketakutan' yang dengan serta merta akan menarik perhatian media massa. Berkat jasa media massa publik di seluruh negeri bahkan di seluruh dunia mengetahui apa yang telah terjadi dan menjadi tertarik untuk memperhatikannya. Dengan begitu terorisme kemudian menjadi suatu aksi kekerasan yang dilancarkan untuk tujuan-tujuan tertentu, yang intinya merupakan tindakan bersifat pemaksaan kehendak dan publikasi politik. Pada awalnya terorisme ditujukan kepada sasaran-sasaran yang bersifat militer atau yang menjadi 'ikon' dari kelompok sasaran yang ditujunya. Pemakaian aksi teror terjadi karena pihak yang bersangkutan merasa tidak berdaya dalam menyampaikan aspirasinya melalui cara-cara yang lazim dan ter-legitimasi secara formal. Tatanan politik

³ Nasir Abbas, 2005, *Membongkar Jemaah Islamiyah*, vide laporan International Crisis Group (ICG), *Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous*, Asia Report No. 63, 26 Agustus 2003, <http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm.id=1452&=1>, diakses 19 Maret 2006

4 Majalah *Tempo*, Edisi 17, 23 Oktober 2005, "Teroris Baru Jaringan Lama", h.45-47.

5 Sydney Jones, Majalah *Tempo*, Edisi 17, 23 Oktober 2005, "Sayap Garis Keras itu Bernama Thoifah Muqatilah", hh. 60-63.

6 Grant Wardlaw, 1982, *Political Terrorism: Theory, Tactics & Counter-Measures*, Cambridge University Press, Cambridge, p.5.

7 Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum internasional oleh negara-negara dunia ketiga seringkali dikecam sebagai terorisme, namun oleh Amerika Serikat diyakini sebagai politik luar negeri dalam strategi yang dinamakannya 'pre-emptive'.

yang ada sama sekali tidak memberikan peluang bagi kelompok yang bersangkutan untuk memperjuangkan kepentingannya secara normal.

Sehingga jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media masa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi dengan cara lain. Suatu strategi yang dilakukan dengan memperhitungkan secara 'cermat' untung ruginya. Bahwa cara-cara lain dianggap tidak dapat berfungsi atau dianggap terlalu memakan waktu, sementara situasinya penting dan sumber daya pemerintah sangat unggul.

Karakteristik terorisme politik meliputi:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa dan bersifat sepihak.
2. Menempuh cara-cara pembunuhan dan atau penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.
3. Korban bukanlah tujuan, melainkan dampaknya untuk menciptakan perang 'urat syaraf' (membunuh satu orang untuk menakuti seribu orang).
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas dalam arti ini adalah liputan meluas oleh media massa. Sehingga media massa merupakan bagian dari strategi aksi teror. Oleh karenanya dampak dari suatu aksi teror selalu berkisar dalam 'kerangka berpikir' media massa yaitu harus menarik perhatian.
5. Pesan dari aksi teror biasanya cukup jelas meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku umumnya dimotivasi

oleh idealisme yang cukup tinggi sehingga sangat militan, misalnya berjuang demi bangsa/kemanusiaan/agama.

7. Aksi teror berbeda dengan perang gerilya konvensional atau pemberontakan konvensional karena tidak bermaksud untuk menguasai wilayah secara militer.
8. Semua aktivitas dilakukan secara gerakan 'bawah tanah', seringkali bekerja dalam jaringan dan menggunakan sistem sel, sehingga setiap anggota berada dalam unit-unit yang tidak saling mengenal.
9. Perintah komandan atau pemimpin bersifat absolut dan tuntas.⁸

Keputusan memilih strategi terorisme pada dasarnya adalah untuk memenuhi harapan untuk mengartikulasikan kekerasan secara cerdas sehingga dapat memasukkan isu perubahan politik pada agenda publik. Dengan bantuan media massa melalui pemberitaan besar-besaran kelompok teroris berharap dapat menarik perhatian publik secara optimal dan menggiring isu utama publik saat itu menjadi senada dengan isu perjuangannya. Pemerintah dapat saja menolak isu dari kelompok teroris ini akan tetapi tidak akan dapat mengabaikan tuntutan pihak oposisi yang seperti mendapat tenaga bantuan cuma-cuma dari media massa. Pada dasarnya pemikiran awal dari terorisme diduga dimaksudkan untuk merangsang terjadinya suatu 'revolusi', merekalah yang akan bertindak menyiapkan dasar revolusi massa aktif untuk merongrong kekuasaan pemerintah yaitu menurunkan moral aparatnya. Dengan menebar keguncangan dan kengerian yang sangat mencekam, maka diharapkan pada tingkat yang ekstrim, pemerintah akan bersedia mengalah dan melonggarkan kendali-kendali yang terlalu menekan. Dengan dikacaukannya

⁸ Parafrase dari Grand Wardlaw, 1982, *Political Terrorism, Theory, Tactics & Counter-Measures*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 6-8.

kaidah yang ada digantikan oleh kaidah hukum. Secara teoretis memang benar bahwa kaidah hukum harus mendapat dukungan kaidah lain, akan tetapi tidak berarti bahwa kaidah hukum dapat mengambil alih dan menggantikan peran kaidah lain.

Menurut penulis kebijakan demikian bahkan melebihi para penganut aliran legisme, karena mereka hendak mengganti semua kaidah lain dengan kaidah hukum dalam perundang-undangan, sementara aliran legisme hanya tidak mengakui kaidah di luar perundang-undangan sebagai kaidah hukum. Aliran legisme tidak pernah menggugat keberadaan dan peran kaidah-kaidah lain dalam menciptakan ketertiban masyarakat.

Permasalahan RUU APP dan Perda Pelacuran di atas hanya dua contoh yang dipilih sebagai ilustrasi. Dalam kenyataan permasalahan serupa saat ini men jadi persoalan yang sangat serius karena terjadi diberbagai bidang kehidupan dan diberbagai daerah di Indonesia.

Dalam beberapa waktu yang lalu di media massa diangkat berita tentang kerisauan sejumlah tokoh, termasuk anggota DPR,¹⁷ terhadap maraknya perda yang bernuansa syariat Islam.

Kerisauan tersebut disebabkan karena perda-perda tersebut merumuskan substansi kaidah agama (Islam) menjadi kaidah hukum. Pihak yang mendukung perda-perda tersebut ber argumen tasi bahwa perda itu adalah hasil proses demokrasi dan dibuat sesuai prosedur, sehingga me miliki keabsahan secara politik dan

hukum. Sementara pihak yang tidak setuju berargumen bahwa perda-perda tersebut mengabaikan pluralisme, sehingga proses demokrasi yang menghasilkannya adalah proses demokrasi yang direduksi sebagai "demokrasi suara terbanyak" sehingga menjadi dominasi mayoritas terhadap minoritas.

Sebenarnya perlu kita sadari bahwa antara kaidah agama dengan kaidah hukum adalah merupakan sesuatu yang berbeda, sehingga kita tidak boleh mencampuradukan antara kaidah agama dengan kaidah hukum, terlebih lagi di dalam wilayah Negara kita Indonesia yang pluralistis, yang tidak hanya mengakui adanya satu agama tertentu saja di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kritik dan keberatan terhadap RUU APP dan Perda Anti-Pelacuran dari kacamata hukum sebagaimana penulis kemukakan di atas sepenuhnya berlaku juga untuk perda-perda yang bernuansa syariat Islam. Syafii Ma'arif,¹⁸ mantan Ketua Muhamadiyah, secara lugas menyatakan bahwa : *"Perda-perda yang bernuansa syariat Islam tersebut tidak akan bertahan lama karena tidak akan bisa di-implementasikan. Fenomena itu terjadi karena adanya euforia, dan oleh karenanya hanya akan bersifat sementara"*.

Secara yuridis-normatif penyusunan RUU APP dan Perda Anti-Pelacuran di atas sebenarnya berlebihan dan tidak di perlukan. Sebenarnya dalam KUHP yang merupakan hukum pidana positif sudah ada rumusan pasal tentang delik susila yang dapat digunakan untuk menghukum beberapa

17 Harian Umum KOMPAS, tanggal 13 Juni 2006, halaman 6.

18 Harian Umum KOMPAS, tanggal 15 Juni 2006, halaman 4.

jadi dasar dari gerakan teror itu. Misalnya, munculnya simpati publik terhadap tujuan/dasar tindakan teror untuk kemudian publik akan menjastivikasi bahwa pemerintah memang tidak baik secara moral dan politik.

Kaitan kemiskinan dengan terrorisme

Beberapa ahli meyakini bahwa aktivitas terorisme terselenggara karena adanya faktor-faktor yang melingkupinya, antara lain adalah kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan globalisasi dan ketidak efektifan manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal. Tujuan akhir dari aktivitas teror yang diyakini sebagai peperangan politik ini adalah menumbangkan rejim lawan. Keinginan untuk menumbangkan rejim lawan secara konseptual memang dimungkinkan untuk terjadi terutama bila ada faktor-faktor lain yang pada hakekatnya menunjukkan terjadinya disfungsi sistem sosial, yaitu:

1. Perekonomian nasional yang tidak sehat.
2. Pengangguran yang semakin bertambah.
3. Lapangan pekerjaan yang bukannya bertambah malahan menyusut.
4. Kesenjangan ekonomi yang luar biasa.
5. Inflasi yang tinggi.
6. Korupsi yang merajalela.
7. Ketergantungan pada pihak luar yang semakin besar, dan sebagainya

Kesimpulan

Keputusan memilih strategi terorisme pada dasarnya adalah untuk memenuhi harapan untuk mengartikulasikan kekerasan secara cerdas sehingga dapat memasukkan isu perubahan politik dalam agenda publik.

Problem utama dari aksi-aksi teroris adalah dukungan dari media

massa karena untuk mencapai tujuannya mereka memerlukan tanggapan emosional publik berupa ketakutan massal yang sangat kuat. Keberhasilan aksi-aksi terorisme yang selama ini memerlukan dukungan dari media massa untuk menyebarkan aksi-aksinya kepada publik. Media massa berperan dalam menarik perhatian publik dan menggiringnya kepada isu yang berkaitan dengan isu yang diperjuangkan oleh kaum teroris. Gerakan teroris ditopang oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat di masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik, di samping faktor-faktor yang berasal dari luar negeri, misalnya jaringan-jaringan teroris internasional semacam Al-Qaeda atau tekanan yang berasal dari dampak globalisasi. Ditambah lagi dengan manajemen publik yang tidak efektif sehingga aspirasi masyarakat kebanyakan tidak tersalurkan akibatnya kepercayaan terhadap pemerintah menurun.

Alhasil mereka yang tergolong kaum bawah ini kemudian merasa tidak mendapat perhatian dari pemerintah sehingga mereka rentan bagi pengaruh kaum teroris untuk direkrut menjadi anggota baru dengan iming-iming perbaikan mutu hidup; sesuatu yang kelihatannya tidak akan pernah diperolehnya dari pemerintah.

Daftar Pustaka

- Abadie, Alberto, 2004, *Poverty, Political Freedom and the Roots of Terrorism*, NBER Working Paper No. 1085, Oktober 2004.
- Abbas, Nasir, 2005, *Membongkar Jemaah Islamiyah*, vide laporan International Crisis Group (ICG), *Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous*, Asia Report No. 63, 26 Agustus 2003.

Clutterbuck, Richard, 1987, *Kidnap, Hijack and Extortion*, McMillan, London.

Reich, Walter, (Ed.), 2003, *Origins of Terrorism: Theory, Psychologies, Theologies, State of Mind*, Terjemahan Sugeng Haryanto, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wardlaw, Grant, 1982, *Political Terrorism: Theory, Tactics & Counter-Measures*, Cambridge University Press, Cambridge.

Majalah:

Majalah Tempo, Edisi 17, 23 Oktober 2005.

Majalah TSM: Teknologi & Strategi Militer, Nomor 18 Desember 1988, Jakarta.

Internet:

<http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm.id=1452&1>, diakses 19 Maret 2006.